



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

SIARAN PERS

**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020**

Kendari, 4 Juni 2021

Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, Pukul 14:00 WITA dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyerahan dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara II BPK (Pejabat Eselon I BPK) Bapak Laode Nusriadi, SE., MSi., CA., Ak, CSFA., CPA., CFA kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak H. Abdurrahman Shaleh, SH. MSi., dan Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak H. Ali Mazi, SH. Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2020, BPK memberikan Opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**, perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk yang sembilan kali secara berturut-turut.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK dalam sambutannya menyatakan bahwa LHP atas LKPD Tahun 2020 merupakan *Long Form Audit Report* (LFAR), terdiri atas tiga laporan utama yang menyajikan hasil pemeriksaan keuangan yaitu LHP atas LKPD Tahun 2020 yang memuat Opini serta LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan hasil pemeriksaan kinerja yaitu LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Klasifikasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal tidak tepat;
2. Penetapan harga kontrak Pengadaan Belanja Barang Medis Habis Pakai dan Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sesuai ketentuan;
3. Penetapan status PD Percetakan Sultra yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berlarut-larut;
4. Penetapan Dasar Pengenaan dan Penetapan Tarif PKB BBNKB Tidak Dilaksanakan Secara Akurat; dan
5. Pendataan Objek dan Subjek PKB BBNKB Belum Memadai.

Lebih lanjut Auditor Utama Keuangan Negara II BPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gubernur Sulawesi Tenggara, yang telah mendukung upaya BPK dalam menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterangan lebih lanjut:

Andi Relawati, Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Email : stafhtukalansultra@gmail.com